

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur yang bertumpu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas Wilayah dan Daerah yang terdiri atas Daerah Kabupaten / Kota. Setiap bidang ini memiliki hak istimewa untuk mengontrol dan menangani masalahnya sendiri dengan tujuan akhir untuk memperluas produktivitas dan kecukupan organisasi dan administrasi pemerintah di wilayah setempat.

Demokratisasi yang berkembang dalam kehidupan berbangsadan bernegara, dalam mewujudkan komitmen pemerintahan yang baik atau biasa disebut *good governance* yang menjadi faktor utama dalam memberdayakan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia adalah wujud dari desentralisasi sebagai hasil demokratisasi, Desentralisasi berguna untuk menumbuhkan kiat pemerintah dalam dalam memfasilitasi kebutuhan dan aspirasi daerah sesuai dengan keberagaman masing-masing daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah dibutuhkan guna menumbuhkan kegiatan lokal, sesuai dengan berbagai kondisi dari setiap Kabupaten/Kota. Melalui desentralisasi, setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong aktivitas guna meningkatkan sumber pendapatan, serta peningkatan kemampuan daerah.

Otonomi Daerah merupakan sebuah bentuk nyata dari pelaksanaan Desentralisasi. konsep dasar otonomi Daerah yaitu kewenangan Daerah yang diberikan oleh Pemerintah pusat agar dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan Daerah masing-masing. dengan kewenangannya tersebut Daerah akan menjadi kreatif untuk dapat menciptakan kegiatan ekonomi dan pembangunan Daerah, Yuwono, (2007) melalui penerapan Otonomi daerah yang baik diharapkan pemerintah untuk dapat mengupayakan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, adapun jenis pelayanan yang dapat diupayakan diantaranya informasi yang bersifat transparan dan responsibilitas. Hak dan kewenangan serta kewajiban yang harus dipenuhi dari penerapan Otonomi daerah adalah agar daerah otonom untuk mampu mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat daerah otonomi dan sesuai dengan peraturan Undang-undang yang ditetapkan (Wahab, 2016).

Undang-Undang No 33 tahun 2004 terkait dana perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah, Undang-Undang tersebut menegaskan, dalam sistem Pemerintahan Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri agar sejalan terkait dengan hal yang diperlukan dengan mengedepankan akuntabilitas dan responsibilitas terhadap masyarakat, turut menimbang kondisi Daerah agar asas Desentralisasi, penggunaan anggaran tetap terjaga, menunjukkan sudut pandang terbaru atas penganggaran daerah, penganggaran daerah sebaiknya mengacu untuk kepentingan masyarakat, pengelolaan yang berdayaguna dan mampu menciptakan kejelasan penggunaan anggaran dan

akuntabilitas secara merata dalam seluruh tatanan anggaran. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dalam otonomi diwujudkan dengan memberikan kebebasan daerah untuk mengelola dan memberdayakan keuangan daerah lebih luas, transparan, serta bertanggungjawab. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebuah cerminan kemampuan suatu daerah. Pendapatan dari masing-masing daerah merupakan hal penting untuk setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah baik di bidang pemerintahan maupun dibidang pembangunannya.

Undang-Undang No 33 tahun 2004 menegaskan dan konsekuensi pada pemerintahan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, kemasyarakatan, serta melakukan pembangunan di daerah yang menjadi kewenangnya. Dari hal ini dapat diketahui pada dasarnya pemerintah daerah harus mampu memunculkan sumber-sumber pendapatan asli daerah,hal ini menjadi pedoman untuk setiap daerah dalam menjalankan desentralisasi. Pada hakikatnya apabila kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) tinggi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menunjukkan kecilnya dependensi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang besar atas kemandirian suatu daerah dikarenakan suatu daerah dapat disebut daerah yang berkuasa apabila mampu menumbuhkan potensi yang dimilikinya dan bisa membuat daerah tidak berdayaguna bergantung dari cara suatu daerah mengoperasikan keuangannya. Penyelenggaraan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau melaksanakan *for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dankeadilan akan mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang secara tidak langsung dapat mengurangi angka

pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Pengurusan suatu daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia, namun sumber daya ekonomi merupakan hal penting berupa keuangan, yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah (Wahab, 2016)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya penyelenggaraan pemerintah daerah. Anggaran daerah memiliki posisi penting dalam usaha pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah harusnya digunakan sebagai inisiatif untuk dapat menghitung besarnya pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan rencana pembangunan masing-masing daerah, alat kontrol pengeluaran di masa mendatang, ukuran standar untuk pengujian kinerja dan alat penyalarsan unit kerja dari berbagai aktivitas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta alat bagi pemerintah dalam menjalankan perekonomian suatu Negara. APBN menyangkut beberapa hal diantaranya keputusan ekonomi hingga keputusan politik. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). hak legislasi yang dimiliki, penganggaran, dan pengawasan harus berperan aktif dalam menjaga APBN hingga dapat di Realisasikan secara efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengelola perekonomian suatu negara.

Sektor publik seringkali dianggap sebagai sarang kebocoran dana, pemborosan dan institusi yang hampir selalu mengalami kerugian. Sudut pandang yang buruk sudah melekat pada pemerintah khususnya dalam pelayanan publik. hal ini disebabkan karena

penyelenggara yang kurang profesional dalam menjalankan tugas yang diamanatkan oleh masyarakat, hal ini menimbulkan sebuah pemikiran akan pentingnya perhatian khusus pada kontribusi peran petugas pelayanan publik. Melalui konsep *Value for money* pengelolaan organisasi sektor publik didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Mardiasmo, (2002) menyatakan Prinsip *value for money* dalam pengukuran kinerja dapat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mekanisme manajemen pemerintahan yang dilakukan.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 pasal 8, menyebutkan terkait APBD yang disusun dengan menerapkan pendekatan kinerja. pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pencapaian *output* maksimal hal yang harus di kedepankan adalah dengan melakukan pendekatan kinerja melalui perencanaan dan alokasi biaya ataupun *input* yang ditetapkan. Analisa Kinerja keuangan APBD setiap tahunnya dianalisa dengan cara membandingkan hasil yang dicapai setiap tahunnya dengan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Rendahnya kapasitas atau kemampuan daerah dalam mengelola keuangan akan memicu munculnya efek negatif yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat, Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai sumber daya alam yang tinggi hingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten/Kota. Laporan Riilisasi pendapatan dan belanja tiap daerah di Provinsi Jambi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Tren Kinerja Realisasi APBD
Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
Tahun 2016 – 2019

Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	Persentase Kinerja			
	2016	2017	2018	2019
Kerinci	104	102	96	103
Merangin	99	47	99	78
Sarolangun	100	94	90	72
Batanghari	97	100	97	102
Muaro Jambi	96	103	94	102
Tanjung Jabung Timur	98	97	104	106
Tanjung Jabung Barat	81	98	97	104
Tebo	103	95	96	66
Bungo	94	93	103	86
Kota Jambi	97	100	97	127
Kota Sungai Penuh	105	100	102	86
Rata-Rata Persentase	98	94	98	94

Sumber : Data diolah peneliti

Selama Periode 2016-2019 tren kinerja Riilisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi disetiap tahunnya namun tetap berada dalam kategori tinggi kecuali kinerja kaeuangan Kabupaten Merangin pada tahun 2017 yang berada dalam kategori rendah senilai 47%. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2018 sebesar 7%, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2%. Hal ini menunjukkan kemampuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan pendapatan dan potensi daerah. Persentase Kinerja Keuangan tertinggi dipegang oleh Kota Jambi yaitu 127% dan persentase kinerja keuangan terendah berada pada Kabupaten Merangin yaitu senilai 47%. Tujuan

melihat kinerja Riilisasi APBD adalah untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB Riil Per Kapita masing-masing Kabupaten/Kota. (Ani & Dwirandra, 2014) dalam penelitiannya mengatakan Kinerja Keuangan Daerah dalam hal ini Rasio kemandirian keuangan Daerah memiliki pengaruh positif pada Pertumbuhan Ekonomi.

Hamzah (2007) menggambarkan bahwa terjadi kesenjangan yang sangat tinggi dalam kinerja keuangan pada masing-masing daerah yang berbeda. Perbedaan kinerja disebabkan perbedaan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan dan potensi dari masing-masing daerah, maka secara tidak langsung hal ini menyebabkan perbedaan kemampuan daerah dalam meingkatkan PDRB Riil Per Kapitanya. Sehwat dan Giri (2019) menyatakan bahwa terdapat integrasi antara perkembangan keuangan terhadap perekonomian di India, hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan keuangan berdasarkan statistik memiliki pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya dapat menunjang kinerja perekonomian di India. Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung mampu mempengaruhi kenaikan *output* belanja modal menjadi meningkat secara keseluruhan. hal ini bukan hanya berdasarkan aspek pengeluaran pemerintah namun investasi dari pihak swasta juga mempengaruhi peningkatan *output* belanja modal mampu menjadikan anggaran pendapatan yang diperoleh pemerintah menjadi meningkat diikuti pula dengan peningkatan alokasi belanja modal (Fretes, 2017).

Analisis yang dilakukan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi merupakan hal yang penting untuk membuat kajian melakukan penilaian

apakah daerah tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan PDRB Riil Per Kapita melalui kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai setiap tahunnya sehingga dapat diukur kecenderungan yang terjadi disuatu daerah. Laju Pertumbuhan PDRB Riil Per Kapita mengalami pertumbuhan yang positif, namun jika dilihat antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih terjadi perbedaan, hal ini dapat dilihat Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 :

Tabel 1.2
Persentase Laju PDRB Riil Per Kapita
di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2016-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018*	2019**
Kerinci	6,41	6,72	5,86	5,14	5,02
Merangin	5,40	6,22	5,39	5,00	4,51
Sarolangun	3,59	4,26	4,68	4,99	5,08
Batanghari	4,27	4,65	4,81	4,96	4,99
Muaro Jambi	5,25	5,49	4,95	5,12	5,06
Tanjung Jabung Timur	1,81	2,65	3,07	3,09	4,25
Tanjung Jabung Barat	3,64	3,14	4,48	6,80	5,15
Tebo	5,35	5,40	5,58	5,00	4,78
Bungo	5,13	5,39	5,68	4,71	4,34
Kota Jambi	5,12	6,84	4,68	5,26	5,33
Kota Sungai Penuh	7,06	6,51	6,25	5,04	5,12
Rata-Rata Persentase	4,82	5,21	5,04	5,01	4,88

Sumber : Badan Pusat Statistik
 *) : Angka Sementara
 **) : Angka Sangat Sementara

Laju PDRB Riil Per Kapita tertinggi pada tahun 2019 dipegang oleh Kota Jambi senilai 5,33 persen. Sebaliknya laju PDRB Riil Per Kapita terendah pada tahun 2019 terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur senilai 4,25 persen. Terdapat beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang mengalami peningkatan laju PDRB Riil Per Kapita disetiap tahunnya dari tahun 2016 - 2019 yaitu Kabupaten Sarolangun, Batanghari dan Tanjung Jabung Timur. PDRB Riil Per Kapita yang tinggi diiringi dengan meningkatnya pelayanan bagi masyarakat hal ini dapat dilihat dari tingkat Indeks Pembangunan Manusia atau biasa disingkat IPM suatu daerah. Dalam kaitannya mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, berdasarkan penelitian yang dilakukan Lindahman dan Thurmaier (2002) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat atau dapat diartikan bahwa desentralisasi fiskal mampu menunjang pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Kumpangpune et al., (2019) Efektivitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi artinya tidak ada hubungan linier antara variabel rasio efektivitas terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, ketika rasio efektivitas tinggi, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami penurunan. Efisiensi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Artinya ada hubungan linier antara variabel rasio efisiensi terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, ketika rasio efisiensi tinggi, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami kenaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh sebuah Negara. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia yang telah disusun, bisa ditetapkan tiga kelompok Negara. Pertama, Negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah bila IPM nya berkisar antara 0 sampai dengan 0,5. Kedua, Negara dengan tingkat pembangunan manusia kategori sedang apabila IPM nya berkisar antara 0,51 hingga 0,79. Ketiga, Negara dengan tingkat pembangunan manusia tinggi apabila IPM nya berkisar diantara 0,80 sampai 1. IPM merupakan data strategis sebagai salah satu alokator pada anggaran pemerintah. Tiga indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Dengan menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup layak.

Berdasarkan data IPM Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jambi terjadi peningkatan setiap tahunnya. Provinsi Jambi mengalami peningkatan IPM sebesar 0,8 % hingga menjadikan IPM berada dalam kategori yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Fretes (2017) Daerah dengan tingginya pertumbuhan ekonomi mempunyai peluang untuk mempunyai IPM yang tinggi di atas rata-rata IPM Provinsi, namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi yang hampir secara keseluruhan menunjukkan bahwa IPM berada di kategori sedang kecuali Kabupaten Kerinci, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh sudah berada di kategori tinggi. Hal tersebut dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
Tahun 2015-2019

Provinsi Jambi	Indeks Pembangunan Manusia				
	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Jambi	68,89	69,62	69,99	70,65	71,26
Kerinci	68,89	69,68	70,03	70,59	70,95
Merangin	67,15	67,86	68,30	68,81	69,07
Sarolangun	68,10	68,73	69,03	69,41	69,72
Batanghari	68,05	68,70	68,92	69,33	69,67
Muara Jambi	66,66	67,55	67,86	68,34	69,01
Tanjung Jabung Timur	61,12	61,88	62,61	63,32	63,92
Tanjung Jabung Barat	65,03	65,91	66,15	67,13	67,54
Tebo	67,29	68,05	68,16	68,67	69,02
Bungo	68,34	68,77	69,04	69,42	69,86
Kota Jambi	75,58	76,14	76,74	77,41	78,26
Kota Sungai Penuh	73,03	73,35	73,75	74,67	75,36

Sumber : Badan Pusat Statistik

Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi kinerja keuangan yang berfluktuasi hingga dapat mempengaruhi Pertumbuhan PDRB Riil Per Kapita pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang juga mengalami fluktuasi hampir disetiap tahunnya, hal ini menunjukkan ketimpangan pertumbuhan antar daerah, makroekonomi yang tidak stabil diakibatkan oleh rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang menimbulkan efek negatif bagi pemerintahan yaitu menurunnya pelayanan hingga mampu menurunkan tingkat PDRB Riil Per Kapita, namun hal ini tidak sejalan dengan data statistik yang menunjukkan tren kinerja Riilisasi APBD yang mencapai angka 96-98% namun tidak berbanding lurus dengan peningkatan PDRB Riil Per Kapita setiap tahunnya yang hanya mencapai 0,13%..

Penelitian ini mengembangkan penelitian Bambang Saputra (2012) yang dahulu meneliti tentang pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap PDRB Riil Per Kapita dan Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan semakin tinggi desentralisasi fiskal, semakin rendah PDRB Riil Per Kapita, berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, yang berarti semakin meningkat PDRB Riil Per Kapita makin meningkat pula kesejahteraan masyarakat dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat, yang berarti bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambah variabel kinerja keuangan diantaranya Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi pemerintah daerah sebagai indikator yang dapat mempengaruhi PDRB Riil Per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Mediasi. Maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi terhadap PDRB Riil Per Kapita dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel Intervening (studi empiris pada pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2016-2019).

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap terhadap PDRB Riil Per Kapita?
2. Apakah Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
3. Apakah Kemandirian Keuangan Daerahber pengaruh signifikan terhadap PDRB Riil Per Kapita?
4. Apakah Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
5. Apakah Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap PDRB Riil Per Kapita?
6. Apakah Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
7. Apakah Efisiensi berpengaruh signifikan terhadap PDRB RiilPer Kapita?
8. Apakah Efisiensi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
9. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap PDRB Riil Per Kapita?
10. Apakah Desentralisasi Fiskal secara tidak langsung berpengaruh terhadap PDRB Riil Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia?

11. Apakah kemandirian keuangan daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap PDRB Riil Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia?
12. Apakah Efektivitas secara tidak langsung berpengaruh terhadap PDRB Riil Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia?
13. Apakah Efisiensi secara tidak langsung berpengaruh terhadap PDRB Riil Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap terhadap PDRB Riil Per Kapita
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap terhadap Indeks Pembangunan Manusia
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap PDRB Riil Per Kapita
4. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia
5. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Efektivitas terhadap PDRB Riil Per Kapita?
6. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Efektivitas terhadap Indeks Pembangunan Manusia

7. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Efisiensi terhadap PDRB Riil Per Kapita
8. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Efisiensi terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
9. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB Riil Per Kapita?
10. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Desentralisasi Fiskal secara tidak langsung terhadap PDRB Riil Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia
11. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kemandirian keuangan daerah secara tidak langsung terhadap PDRB Riil Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia
12. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Efektivitas secara tidak langsung terhadap PDRB Riil Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia
13. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Efisiensi secara tidak langsung terhadap PDRB Riil Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengukuran Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pengukuran PDRB Riil Per Kapita untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah dan upaya menggali potensi daerah sehingga dapat menunjang perekonomian dan kinerja pemerintah baik dari segi keuangan maupun non keuangan.